



**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR TERHADAP  
KETIDAKSESUAIAN TAGIHAN PIUTANG DALAM KEPAILITAN  
AKIBAT BERAKHIRNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG**

**(Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**MUHAMMAD REGGY FERNANDA**

NIM 11000120130328

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR TERHADAP  
KETIDAKSESUAIAN TAGIHAN PIUTANG DALAM KEPAILITAN  
AKIBAT BERAKHIRNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG  
(Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

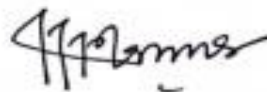
Oleh:

**MUHAMMAD REGGY FERNANDA**

NIM 11000120130328

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Muhammad Reggy Fernanda**

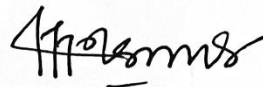
NIM 110001201320328

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Juni 2024

Semarang, 21 Juni 2024

**Dewan Penguji,**

Ketua Penguji,



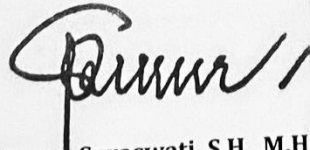
**Dr. Siti Mahmudah. S.H., M.H.**  
NIP 196209241989022001

Anggota Penguji 1,




**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**  
NIP 195910051986031001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro,



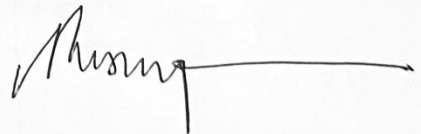
**Prof. Dr. Retno Saraswati. S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



**Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.**  
NIP H.7.199211192018072001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulitstyan. S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## FERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis.



**Muhammad Reggy Fernanda**

NIM 11000120130328

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*(What you do in this world is a matter of no consequence. The question is what can you make people believe you have done.)*

**-Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle**

*(Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.)*

**-Mahatma Gandhi**

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya.**
- ❖ **Ayah dan Ibu, serta adik-adik penulis;**
- ❖ **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;**
- ❖ **Seluruh teman dan sahabat penulis;**
- ❖ **Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**

## ABSTRAK

Kepailitan merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang antara debitor dengan kreditor melalui sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Keadaan pailit dapat timbul ketika PKPU berakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut membuat adanya permasalahan mengenai kedudukan atas tagihan piutang yang telah dicocokkan pada proses kepailitan setelah proses PKPU berakhir. Selama proses pencocokan piutang, debitor membutuhkan perlindungan hukum sebagaimana yang ada di Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dengan pihak antara PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) terhadap Kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit).

Permasalahan di atas mendasari penulis untuk mengetahui kedudukan hukum tagihan tersebut beserta perlindungan hukum debitor dalam upaya hukum *renvoi* prosedur. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang ditunjang dengan jenis spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat ketentuan eksplisit mengenai pengaturan kedudukan tagihan piutang yang telah dicocokkan dalam kepailitan akibat berakhirnya PKPU yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena hanya mengatur perbuatan yang dilakukan selama debitor dinyatakan PKPU, demi hukum termasuk dalam perbuatan yang dilakukan kurator. Selain itu, dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan kedudukan tagihan piutang atas para kreditor adalah sah, namun terdapat penyesuaian jumlah tagihan piutang berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci:** Kepailitan, PKPU, pencocokan piutang.

## ABSTRACT

*Bankruptcy is a form of debt resolution between a debtor and creditors through the general seizure of the debtor's assets conducted by a curator under the supervision of a supervising judge. Bankruptcy can arise when the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) ends, as regulated in Article 255 paragraph (6) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This situation creates issues regarding the status of verified claims in the bankruptcy process after the PKPU process ends. During the verification process of claims, the debtor needs legal protection, as highlighted in Case Number 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. between PT Bangun Investa Graha (In Bankruptcy) and the Curator of PT Bangun Investa Graha (In Bankruptcy).*

*These issues prompted the author to investigate the legal status of these claims and the legal protection of the debtor in the renvoi procedure. The method used is a normative juridical approach supported by secondary data with a descriptive analytical research specification.*

*Based on the research conducted, there are no explicit provisions regarding the regulation of the status of verified claims in bankruptcy due to the end of the PKPU in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, as it only regulates actions taken during the debtor's PKPU status, which by law are included in the curator's actions. Moreover, in the aforementioned decision, the Panel of Judges declared the status of creditors' claims to be valid, but there were adjustments to the amount of claims based on the provisions of the Civil Code and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations*

***Keywords: Bankruptcy, suspension of debt payment obligation, verification process of claims.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR TERHADAP KETIDAKSESUAIAN TAGIHAN PIUTANG DALAM KEPAILITAN AKIBAT BERAKHIRNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”** dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan atas suatu tagihan dalam pencocokan piutang.

Selama pembuatan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;



5. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas arahannya serta ketulusannya yang telah membimbing penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
6. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulis atas perhatian dan bantuannya bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini;
7. Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta semua Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua penulis yang telah menaruh harapan dan cita-cita pada anak-anaknya yang telah senantiasa membimbing dan mendukung penulis serta saudara penulis di segala keadaan. Segala doa yang telah tulus dipanjatkan oleh Mamah dan Papah telah melindungi penulis dalam penulisan hukum ini;
10. Adik-adik penulis, Husnia Nafla Azzahra, Husna Athofatun Nisa, Fatimah Nadiyya Husna, yang telah menjadi adik yang saling mendukung dan menghibur selama penulis menyelesaikan penulisan hukum;
11. Abang, kakak, dan teman-teman yang membersamai penulis selama mengarungi masa perkuliahan, Ranggap Grup, Delegasi NMCC Bulaksumur V 2022, Dewan Pengurus UKM-F Pseudorechtspraak 2023,

Pejuang Subuh, serta sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Demikian penulisan hukum ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Reggy Fernanda', written in a cursive style.

**Muhammad Reggy Fernanda**

NIM 11000120130328

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....</b>	<b>21</b>
1. Sejarah dan Pengertian Kepailitan .....	21
2. Tujuan Kepailitan.....	24
3. Asas- - Asas dalam Kepailitan .....	26
4. Syarat Permohonan Kepailitan .....	28
5. Tahapan Pencocokan Piutang .....	32

<b>B. Tinjauan Umum tentang PKPU .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian dan Perbedaan Kepailitan dengan PKPU.....	38
2. Tujuan PKPU .....	39
3. Pengajuan Permohonan PKPU .....	40
4. Kepailitan Debitor dalam Proses PKPU .....	41
<b>C. Tinjauan Umum tentang Renvoi Prosedur dalam Kepailitan .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Renvoi.....	43
2. Renvoi Prosedur dalam Kepailitan .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kedudukan Hukum Tagihan Piutang Setelah Putusan Pailit Akibat Berakhirnya PKPU.....</b>	<b>47</b>
1. Tugas dan Wewenang Kurator.....	47
2. Tahapan Pencocokan Piutang dalam Kepailitan.....	50
3. Analisis Kedudukan Hukum Tagihan Piutang Setelah Putusan Pailit Akibat Berakhirnya PKPU.....	56
<b>B. Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Ketidaksesuaian Tagihan Piutang Dalam Kepailitan Akibat Berakhirnya PKPU pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....</b>	<b>58</b>
1. Duduk Perkara .....	58
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	64

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>79</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>